

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKj IP)**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKj-IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penyusunan LKj-IP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj-IP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2018, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Bupati Grobogan serta kebijakan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan 2016-2021.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj-IP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj-IP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj-IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan secara lebih sinergis.

Purwodadi, Februari 2019

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Daerah Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM  
NIP. 197204091992031002

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai visi dan misi Bupati Grobogan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj-IP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan tersebut.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKj-IP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada dalam LKj-IP tersebut diharapkan segenap stakeholders Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat berperan aktif dan bekerja

sama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 dapat dikatakan **Baik / Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 2018 dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 menunjukkan bahwa:

1. **Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan adalah 98,72 % dengan kategori baik.
2. **Capaian indikator kinerja utama** dari 2 (dua) indikator kinerja utama yang ada dikategorikan sangat berhasil, hal ini karena capaian dari :
  - a. Indikator kinerja utama Prosentase Pejabat Yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, mencapai 68,92 %. Target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 80 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 86,15 %.
  - b. Indikator kinerja utama Prosentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai, mencapai 88,89 %. Target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 75 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 118,52 %.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam bentuk memberikan masukan kepada aparatur pemerintah daerah tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun di bidang adminstrasi yang sudah diberikan oleh organisasi, serta dapat memberikan masukan tentang tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Grobogan.

Purwodadi, Februari 2019

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Daerah Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM  
NIP 197204091992031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Ikhtisar Eksekutif	.....	iii
Daftar Isi	.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
I Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	.....	1
A Kelembagaan Organisasi	.....	1
B Uraian Organisasi	.....	2
II Fungsi Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	.....	3
III Permasalahan Umum Organisasi	.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	5
I Perencanaan Kinerja	.....	5
A Visi dan Misi	.....	5
B Tujuan dan Sasaran	.....	7
II Perjanjian Kinerja	.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	.....	9
I Capaian Kinerja Organisasi	.....	9
II Realisasi Anggaran	.....	15
BAB IV PENUTUP	.....	23
I Tinjauan Umum Capaian Kinerja	.....	23
II Strategi / Program Kerja Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang	.....	24
Lampiran-Lampiran	.....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

#### **A. Kelembagaan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pendataan.
  - b. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.



4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
  - b. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pembinaan Kedisiplinan.
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

## **B. Uraian Organisasi**

Dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas, jumlah karyawan yang ada, baik pejabat maupun staf adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan :
  - a. Pasca Sarjana : 9 orang
  - b. D IV / Sarjana : 18 orang
  - c. Sarmud (D1 –DIII) : 4 orang
  - d. SLTA : 9 orang
  - e. SLTP : 0 orang
  - f. SD : 0 orang
2. Pegawai berdasarkan golongan :
  - a. Golongan IV : 5 orang
  - b. Golongan III : 29 orang
  - c. Golongan II : 6 orang
3. Pegawai berdasarkan jabatan :
  - a. Eselon II : 1 orang
  - b. Esselon III : 5 orang

- c. Esselon IV : 11 orang
- d. Staf : 23 orang

## **II. FUNGSI STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, tugas pokok dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan Pegawai ASN, mutasi Pegawai ASN, pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN serta pembinaan Pegawai ASN di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **III. PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI**

Kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepegawaian sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pemasalahan umum (*strategic issued*) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan,
2. Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah, dan
3. Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II. Perencanaan Kinerja**

##### **A. Visi dan Misi**

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, serta dalam rangka memacu motivasi kerja dan memperjelas arah peningkatan kinerja organisasi, visi (gambaran/kondisi yang ingin dicapai di masa depan) yang ditetapkan oleh Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”.**

Penjelasan dari Visi Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten.

Selanjutnya untuk memperjelas tahapan pencapaiannya, visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Untuk kurun

waktu Tahun Anggaran 2016-2021 misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen

kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok di atas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung pencapaian misi ke-6 (enam) yaitu ***meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.***

## **B. Tujuan dan Sasaran.**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Grobogan yang telah ditetapkan serta analisis terhadap lingkungan, tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur Negara.***

### **2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik , terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN.***

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- a. Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan, sebesar 80 %; dan
- b. Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai, sebesar 75 %.

### **3. Target Kinerja**

Adapun Target Kinerja yang akan dicapai tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan, Tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam lampiran 1, yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Bab II ini.

### **III. Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2018 telah melaksanakan 5 (lima) program dan terjabar dalam 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 6.599.927.000,00 (*enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*)

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

#### **I. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang



Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, penilaian capaian kinerja diukur dengan :

1. Target dan realisasi kinerja yang berdasarkan sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu : **meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN**, dengan indikator sasaran yaitu :
  - a. Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan.

Tabel 3.2 Kompetensi Pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No	Ess	Jml Pejabat	Jumlah Pejabat yg memenuhi syarat			Sesuai Kompetensi	%
			Pangkat / Gol.	Pend	Diklat PIM		
1	II	36	36	36	23	23	63,88
2	III	182	182	182	153	153	84,07
3	IV	712	712	622	465	465	65,31
Jumlah		930	930	840	641	641	68,92

Pejabat yang memenuhi standart kompetensi di sini adalah pejabat yang memenuhi persyaratan pangkat/golongan, pendidikan dan telah mengikuti diklat PIM sesuai dengan jabatannya.

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa pejabat yang memenuhi standart kompetensi pada Pemerintah Kabupaten Grobogan capaiannya sebesar 68,92 % dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan

sebesar 80 % berarti telah tercapai 86,15 % atau dapat dikategorikan **baik**.

- b. Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai.

Tabel 3.3 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kasus yang ditangani	27 kasus
2	Kasus yang terselesaikan	24 kasus
	a. Dengan SK Bupati Grobogan	23 kasus
	b. Menunggu Keputusan Bupati	1 kasus
	c. Penyelesaian dengan tanpa hukuman disiplin	- kasus
3	Masih dalam proses	3 kasus
4	Prosentase	88,89

Dari tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator sasaran ini, penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai dalam kategori **sangat baik** yakni mencapai 88,89 %. Target kinerja adalah 75 %, sehingga dapat dikatakan melampaui target atau 118,52 % dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari 24 (dua puluh empat) kasus yang terselesaikan dari 27 (dua puluh tujuh) kasus yang ditangani.

- c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3 maka dapat dilihat perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80	68,92	
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	75	88,89	

2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian kinerja organisasi tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	60,72	65,55	68,92
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	82,86	84,00	88,89

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat kenaikan capaian kinerja baik untuk indikator prosentase pejabat yang memenuhi standart

kompetensi jabatan maupun prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai.

Untuk indikator sasaran prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan mengalami kenaikan sebesar 4,83 % tahun 2017 dari 60,72 % pada tahun 2016 menjadi 65,55 % pada tahun 2017. Indikator ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 3,37 % dari 65,55 % pada tahun 2017 menjadi 68,92 % tahun 2018. Walaupun demikian angka ini masih belum memenuhi target kinerja yaitu 80 %.

Sedangkan indikator sasaran prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,14 % tahun 2017 dari 82,86 % pada tahun 2016 menjadi 84,00 % pada tahun 2017. Indikator ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 4,89 % dari 84,00 % pada tahun 2017 menjadi 88,89 % tahun 2018. Angka ini sudah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu 75 %.

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja s.d. tahun 2018

No	Indikator Sasaran	2016		2017		2018	
		Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80,00	60,72	80,00	65,55	80,00	68,92
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	75,00	82,86	75,00	84,00	75,00	88,89

Dari tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa relisasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dokumen perencanaan strategis dalam kategori baik dan sangat baik.

Untuk indikator sasaran prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan di tahun 2018 mencapai 68,92 %. Target yang direncanakan sebesar 80 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator ini adalah 86,15 % atau kategori **baik** .

Sedangkan untuk indikator sasaran prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di tahun 2018 mencapai 118,52 %, hal ini karena capaiannya 88,89 % dari target yang direncanakan sebesar 75,00 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator ini dalam kategori **sangat baik**.

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja.  
Keberhasilan capaian kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan ini didukung sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang tersedia.
  - b. Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja.  
Kegagalan capaian kinerja pada indikator sasaran pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan antara lain masih belum maksimalnya jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana diklat yang ada di Kabupaten Grobogan.
  - c. Alternatif solusi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM dengan melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi

Jawa Tengah sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat PIM di BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya, terutama anggaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga di beberapa kegiatan, anggaran yang tersedia tidak terserap maksimal tetapi output yang dihasilkan dapat maksimal sesuai target, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 di bawah ini

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Tahun 2018

No	Tingkat Efisiensi (%)	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	< 10	29	
2	10 - 20	7	
3	> 20	2	
		38	

Secara keseluruhan sumber daya anggaran yang tersedia adalah Rp 6.599.927.000,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 6.230.669.551,- atau sebesar 94,41 % yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 5,59 %.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja karena didukung dengan anggaran, sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang tersedia di samping perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan.

## II. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dalam pelaksanaan sasaran strategis dan indikator sasaran diwujudkan dengan 5 (lima) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, pada tahun anggaran 2018 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.599.927.000,00 (*enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang penggunaannya dijabarkan dalam tabel 3.8. dibawah ini :

**Tabel 3.8. Capaian Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2018**

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			Rupiah	%	%	Rupiah	%	%	
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.213.359.000</b>	<b>1.213.359.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.141.676.836,00</b>	<b>94,09</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000,00	100,00	100,00	9.975.000	99,75	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	100,00	81.971.450	86,29	100,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000	45.000.000,00	100,00	100,00	40.442.750	89,87	100,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.000.000	125.000.000,00	100,00	100,00	118.983.000	95,19	100,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000,00	100,00	100,00	45.543.750	82,81	100,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	18.000.000,00	100,00	100,00	17.830.000	99,06	100,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.952.000	24.952.000	100,00	100,00	22.961.560	92,02	100,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	6.520.000	81,50	100,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	110.000.000	110.000.000	100,00	100,00	78.234.000	71,12	100,00	
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	675.000.000	675.000.000	100,00	100,00	674.521.076	99,93	100,00	



NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			Rupiah	%	%	Rupiah	%	%	
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	18.137.250	90,69	100,00	
12	Penyediaan Jasa Keamanan dan Transportasi	27.407.000	27.407.000	100,00	100,00	26.557.000	96,90	100,00	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>138.841.452,00</b>	<b>89,58</b>		
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	46.703.000	93,41	100,00	
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00	67.408.452	84,26	93,00	
15	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	24.730.000	98,92	100,00	
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>39.993.000</b>	<b>39.993.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>36.927.000,00</b>	<b>92,33</b>		
16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	39.993.000	39.993.000,00	100,00	100,00	36.927.000	92,33	100,00	
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.993.550.000</b>	<b>1.993.550.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.957.626.152,00</b>	<b>98,20</b>		
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	147.694.000	98,46	100,00	
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	180.000.000	180.000.000	100,00	100,00	179.441.902	99,69	100,00	

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			Rupiah	%	%	Rupiah	%	%	
19	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD	275.000.000	275.000.000	100,00	100,00	259.410.000	94,33	96,00	
20	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	1.158.350.000	1.158.350.000	100,00	100,00	1.142.493.750	98,63	100,00	
21	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD	230.200.000	230.200.000	100,00	100,00	228.586.500	99,30	100,00	
<b>E</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>3.198.025.000</b>	<b>3.198.025.000</b>	<b>100,00</b>		<b>2.955.598.111</b>	<b>92,42</b>		
22	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	274.000.000	274.000.000	100,00	100,00	221.271.732	80,76	92,00	
23	Seleksi Penerimaan Calon PNS	858.325.000	858.325.000	100,00	100,00	804.651.374	93,75	99,37	
24	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawain Daerah	195.500.000	195.500.000	100,00	100,00	184.066.557	94,15	100,00	
25	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00	
26	Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	118.500.000	118.500.000	100,00	100,00	118.467.200	99,97	100,00	

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			Rupiah	%	%	Rupiah	%	%	
27	Montoring, Evaluasi dan Pelaporan	37.000.000	37.000.000	100,00	100,00	36.984.500	99,96	100,00	
28	Pembinaan Administrasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	34.880.000	99,66	100,00	
29	Penempatan PNS	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00	79.998.590	100,00	100,00	
30	Pelayanan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	25.200.000	25.200.000	100,00	100,00	25.200.000	100,00	100,00	
31	Pembinaan dan Fasilitasi PNSD yang Memasuki Purna Tugas	294.500.000	294.500.000	100,00	100,00	293.787.100	99,76	100,00	
32	Assesment/ Penilaian Kompetensi Bagi PNSD	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	98.707.500	98,71	100,00	
33	Seleksi Terbuka, Mutasi dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi	950.000.000	950.000.000	100,00	100,00	851.243.458	89,60	76,00	
34	Pembinaan Kepegawaian	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00	57.376.000	71,72	95,00	
35	Penataan Sistem Administrasi Kepangkatan PNSD	81.500.000	81.500.000	100,00	100,00	80.842.000	99,19	100,00	
36	Penataan Sistem Administrasi Penggajian PNSD	14.500.000	14.500.000	100,00	100,00	14.472.100	99,81	100,00	

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			Rupiah	%	%	Rupiah	%	%	
37	Penataan Sistem Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	20.650.000	98,33	100,00	
38	Fasilitasi Pindah Tugas Tugas	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	21.000.000	100,00	100,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.599.927.000</b>	<b>6.599.927.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.230.669.551</b>	<b>94,41</b>	<b>98,72</b>	

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, yang secara ringkas komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel 3.9. berikut :

Tabel 3.9. Penyerapan Anggaran Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Penyerapan</b>
1	Belanja Pegawai	686.990.000,-	674.096.250,-	98,12 %
2	Belanja Barang dan Jasa	5.887.985.000,-	5.533.611.741,-	93,98 %
3	Belanja Modal	24.952.000,-	22.961.560,-	92,02 %
<b>Jumlah</b>		<b>6.599.927.000,-</b>	<b>6.230.669.551,-</b>	<b>94,41 %</b>

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun 2018 maka terjadi kenaikan sebesar 8,23 %, sebagaimana tabel 3.10. berikut ini :

Tabel 3.10. Penyerapan Anggaran Tahun 2016, 2017 dan 2018

<b>No</b>	<b>T.A.</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Penyerapan</b>
1	2016	6.480.000.000,-	5.513.608.605,-	85,09 %
2	2017	7.693.500.000,-	6.626.271.811,-	86,13 %
3	2018	6.599.927.000,-	6.230.669.551,-	94,41 %

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **I. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin .

Memperhatikan uraian dan data capaian kinerja tahun 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator sasaran pertama yaitu prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan di tahun 2018 sebesar 68,92 % dari target yang harus dipenuhi sebesar 80 %. Jika diperhitungan secara tertimbang maka pencapaian ini sebesar 86,15 % atau termasuk ketegori **baik**.
2. Pencapaian indikator sasaran kedua yaitu prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di tahun 2018 sebesar 88,89 % dari target yang harus dipenuhi sebesar 75 %. Jika diperhitungan secara tertimbang maka pencapaian ini sebesar 118,52 % atau termasuk ketegori **sangat baik**.

## II. Strategi / Program Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Strategi / Program yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di masa mendatang antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Purwodadi, Februari 2019

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Daerah Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM  
NIP. 197204091992031002